

Terakreditasi
SK No. 34/DIKTI/Kep/2003

ISSN 1411 - 5417



VOL. 6, NO. 2, JUNI 2005

MADANI

JURNAL ILMU - ILMU SOSIAL

Safeguarding dalam Perspektif Program Pembangunan Wilayah di Era Desentralisasi

Peranan Komputer dalam Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

Perencanaan Wilayah Pesisir dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi ✓

Perencanaan, Permasalahan Kota dan Pengembangan Wilayah dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi Spasial

Landasan Hukum Tata Ruang dalam Pengembangan Wilayah

Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Wilayah di Era Otonomi Daerah

Perencanaan Tata Ruang Landasan Program Pengembangan Wilayah dan Sektor

Pengembangan Wilayah dalam Peradaban Islam dan Kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Islam

Pengembangan Wilayah Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pembangunan SDM Terpadu

Pengembangan Wilayah Aceh Pasca Bencana : Beberapa Catatan Mengenai Proses Pembuatan Blue Print Rekonstruksi dan Implementasinya

Migrasi Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengembangan Wilayah Penyabungan sebagai Ibukota Kabupaten Mandailing Natal

ISSN 1411 - 5417

VOL. 6 NO. 2, JUNI 2005

M A D A N I

JURNAL ILMU - ILMU SOSIAL

**Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai dengan
SK Rektor No. 1496/SK/III.B/UMSU/2.b/2003**

Penasihat:

Bahdin Nur Tanjung

Agussani

Armansyah

Ketua Penyunting:

Ardial

Wakil Ketua Penyunting:

Suhrawardi K. Lubis

Penyunting:

H. Usman Pelly (Universitas Negeri Medan)

H. A. Ya'cub Matondang (IAIN SU)

H. Nur Ahmad Fadhil Lubis (IAIN SU)

Hasyimsyah Nasution (IAIN SU)

Hj. Fathul Jannah (IAIN SU)

Abdul Muin Sibuea (Universitas Negeri Medan)

Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan)

Suwardi Lubis (Universitas Sumatera Utara)

Muhammad Arifin Gultom (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

H. Burhanuddin (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Sjafrri Sairin (Universitas Gajah Mada)

Hj. Hansiswary Kamarga (Universitas Pendidikan Indonesia)

Hj. Nina Winangsih Syam (Universitas Padjadjaran)

Hj. Rahim b. Md. Sail (Universitas Putra Malaysia)

Jamilah bt. Othman (Universitas Putra Malaysia)

Hamidi (Universitas Muhammadiyah Malang)

Suzanna Eddyono (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Pelaksana Tata Usaha

Emilia Ramadhani

Zahara

Publikasi ini merupakan hasil penelitian dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu-ilmu Sosial.

Terbit tiga kali setahun (Februari, Juni, Oktober). Terbit pertama kali Februari 1998.

Alamat Penerbit/Redaksi:

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan

Telep. (061) 6621340-6615 721 Kode Pos 20238.

Fax. (061) 6614505, <http://www.umsu.net>

E-mail: jurnalmadani@umsu.net

Kata Pengantar

Safeguarding dalam Pespektif Program Pembangunan Wilayah di Era Desentralisasi (151-164)
Oleh: Nina Siti Salmaniah Siregar (Dosen Kopertis Wilayah I DPK FISIPOL UMA)

Peranan Komuter dalam Pembangunan dan Pengembangan Wilayah (165-176)
Oleh Sugiharto (Dosen dan Ketua Jurusan Geograsi FIS UNIMED)

Perencanaan Wilayah Pesisir dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi (177-190)
Oleh: Mhd Buchari Sibuea (Staf Pengajar Fakultas Pertanian UMSU)

Perencanaan, Permasalahan Kota dan Pengembangan Wilayah dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi Spasial (191-200)
Oleh: H. Bahdin Nur Tanjung (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara)

Landasan Hukum Tata Ruang dalam Pengembangan Wilayah (201-211)
Oleh Ida Martinelly (Dosen Kopertis Wilayah I DPK FISIPOL UMSU)

Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Wilayah di Era Otonomi Daerah (212-223)
Oleh Pamusuf Harahap (Dosen Universitas Graha Padangsidimpuan)

Perencanaan Tata Ruang Landasan Program Pengembangan Wilayah dan Sektor (224-236)
Oleh Syafrinal (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Pengembangan Wilayah dalam Peradaban Islam dan Kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Islam (237-249)
Oleh Syafran (Dosen Ilmu Pendidikan dan Dakwah pada UMTS dan STAIN Padangsidimpuan)

Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pembangunan SDM Terpadu (250-263)
Oleh Jamilah Othman (1), Lambak Tompong (2), Inon Beydha (3) (Dosen (1) dan Mahasiswa S3 (3) Institut Pengajian Komuniti & Keamanan (PEKKA), Universitas Putra Malaysia. Dosen (2) Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pendidikan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Wilayah Aceh PascaBencana: Beberapa Catatan Mengenai Proses Pembuatan Blue Print Rekonstruksi dan Implementasinya (264-276)
Oleh M. Akmal (Lektor pada Fisipol Universitas Malikussaleh-Lhokseumawa)

Migrasi Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja (277-287)
Oleh Efi Brata Madva (1) Zulkifli Amin (2) Dosen (1) dan Ketua Jurusan KPI Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara Medan, Dosen (2) FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Pengembangan Wilayah Penyabungan sebagai Ibukota Kabupaten Mandailing Natal (278-296)
Oleh M. Iqbal Lubis (1) Rinaldy (2) (Dosen (1) STIE Al-Hikmah, ITMI, Swadaya Dosen (2) Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan).

MADANI Jurnal Ilmu-ilmu Sosial telah terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 34/DIKTI/Kep/ 2003, tanggal 10 Oktober 2003 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Rasa syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Swt kami, berkat izin dan inayah-Nya serta dorongan semua pihak, volume 6, nomor 2, Juni 2005, MADANI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial ini terbit kembali.

Tema sentral yang diangkat pada volume keenam, terbitan pertama 2005 ini adalah Pengembangan Wilayah. Cukup banyak tulisan yang masuk ke redaksi, setelah melewati koreksian yang ketat dari Dewan Penyunting, terpaksa ada yang ditolak, karena tidak mungkin dimuat semua. Diharapkan tulisan yang dimuat ini menarik disimak karena membahas berbagai masalah Pengembangan Wilayah dalam kajian Ilmu-ilmu Sosial. Pembahasan setiap penulis, tentu diwarnai oleh keahlian dan latar belakang pendidikan penulis yang beraneka ragam, namun pembahasannya tetap dalam bingkai sosial.

Semoga tulisan yang dimuat pada edisi terbitan kedua 2005 ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca sebagai upaya memperluas wawasan tentang Pengembangan Wilayah. Pengembangan wilayah pada dasarnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak hal yang menarik dengan kajian Pengembangan Wilayah ini, sebab kata wilayah berhubungan dengan pembangunan wilayah mempunyai makna objektif dan subjektif.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan serta kritikan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Nashrun Minallah. Wassalamu'alaikum.wr wb.

Medan, Juni 2005

Penyunting

PERENCANAAN WILAYAH PESISIR DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh Muhammad Buchari Sibuea

Staff Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Kata Kunci: Perencanaan Wilayah, Pesisir, Pertumbuhan Ekonomi

Pesisir merupakan wilayah strategis ditinjau dari sudut pandang perencanaan wilayah. 60 persen penduduk Indonesia bermukim di pesisir dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat lambat dan termasuk miskin yang diperburuk dengan terbatasnya upaya kelembagaan untuk menanganinya, akibatnya selalu mengundang konflik. Konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan berkaitan dengan sumber dayanya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Konflik di antara pengguna yang mengenai pemanfaatan daerah pesisir dan laut tertentu. (2) Konflik di antara lembaga pemerintah yang melaksanakan program yang berkaitan dengan pesisir dan laut. Pesisir wajib dilestarikan secara terencana dan terpadu sehingga meskipun timbul konflik pemanfaatan pesisir sebagai wilayah ekonomi. Dalam rangka mengelola wilayah pesisir, di Indonesia dikembangkan konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Kawasan ini peralihan ekosistem laut dan darat sehingga keterpaduan antara pengelolaan pesisir dan laut, merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Secara objektif isu pengelolaan pesisir kontemporer, perubahan keseimbangan dan problematika akibat pengelolaan pesisir. Secara konseptual, aktivitas ekonomi tidak boleh meniadakan ekuilibrium ekosistem demi keselamatan kehidupan manusia. Alternatif terbaik adalah dengan melakukan perencanaan wilayah pesisir secara integrated dan kontinu.

Pendahuluan

Pesisir adalah wilayah yang unik karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Ray and Alder, 1999:21). Lebih jauh wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi tekanan terhadap pe-

sisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Harus dipahami bahwa pembangunan (berkelanjutan) tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.

Realitas wilayah pesisir yang dinamis dan rawan memerlukan suatu pengelolaan wilayah yang spesifik untuk dapat mengakomodasi semua kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir harus dapat mengakomodir berbagai kepentingan *stakeholder* sekaligus memperhatikan potensi dan kemampuan lingkungan wilayah pesisir sebagai ekosistem yang berkelanjutan tanpa mengurangi hak manusia dan komunitas lainnya untuk hidup di dalamnya.

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, telah dikembangkan apa yang disebut Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management disingkat ICZM*). ICZM merupakan cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia. Banyak terminologi mengenai ICZM yang dikemukakan oleh beberapa negara dan para ahli, namun esensi semuanya sama, yaitu kegiatan manusia dalam mengelola ruang, sumberdaya atau penggunaan yang terdapat di wilayah pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia menggunakan terminologi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT), suatu program ditujukan mengatasi permasalahan pembangunan pesisir, lautan saat ini dan masa depan, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar dapat menikmati keuntungan secara berkesinambungan. Sejahterama program operasionalisasi PWPLT, dapat mengatasi permasalahan yang timbul di wilayah pesisir, hal ini membutuhkan suatu rencana pengelolaan dan memerlukan suatu penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (pasal 1 Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang). Salah satu tahap yang cukup penting dalam penataan ruang adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) pesisir antara lain memuat mintakat-mintakat (*zones*) peruntukan ruang yang merupakan arahan dan pedoman pemanfaatan ruang wilayah.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia adalah bahwa wilayah pesisir dan laut beserta segenap sumberdaya dan jasa-jasa yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri.

Misi pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia adalah pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal, dan merata ke segenap lembaga pelaku pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam pemanfaatan sumberdaya. Menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi segenap lapisan masyarakat, menjamin daya dukung dan kualitas lingkungan.

Tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia adalah pembangunan kawasan pesisir (*coastal zone*) beserta sumberdaya alam dan jasa lingkungan (*environmental services*) secara efisien dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh stakeholders (rakyat) secara adil. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi/menghancurkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. "*development which meets the needs of the present without compromising the ability of generations to meet their own needs*" (Dahuri, 2001:11).

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kontemporer

Kondisi pertumbuhan ekonomi dunia saat ini khususnya pada negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, secara agregat tingkat pertumbuhan ekonominya menurun, sedangkan negara-negara yang memiliki sumber daya alam terbatas tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat. Statemen ini diungkapkan oleh Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner dalam hasil penelitiannya pada 97 negara, yang memiliki sumberdaya alam melimpah seperti; Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, dan lain-lain termasuk Indonesia (Akhmad Fauzi, 2001:21). Walaupun kondisi pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, mengalami peningkatan sedikit, akan tetapi secara keseluruhan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah arah pertumbuhannya menurun. Hal ini akan mendorong semua negara yang memiliki sumber daya alam melimpah untuk memperbaiki diri melalui perbaikan strategi pengelolaan sumber daya masing-masing negara.

Indonesia terkenal dengan potensi sumber daya alam pesisir dan kelautan yang melimpah, hal ini sangat perlu perbaikan strategi pengelolannya. Salah satu langkah memperbaiki strategi pengelolaan sumber daya alam pesisir dan kelautan, perlu menjawab pertanyaan: mengapa negara Jepang, Korea dan Singapura yang kandungan sumber daya alamnya begitu sedikit dan penduduknya kebanyakan tinggal di wilayah pesisir, akan tetapi pertumbuhan ekonominya meningkat serta masyarakatnya maju?

Struktur Kawasan Pesisir

Definisi Wilayah pesisir di Indonesia, adalah kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat. Batas ke arah darat; dari segi *ekologis*; merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut dan lain-lain, *administratif*; merupakan batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 km atau 20 km dari garis pantai). Segi *perencanaan*; bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Batas ke arah laut; dilihat dari segi *ekologis*; adalah kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah di darat seperti (aliran air sungai, run off, aliran air tanah, dll), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen dll); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (*continental shelf*), dari segi *administratif*; adalah sejauh 4 mil atau 12 mil, dari garis pantai ke arah laut dan dari segi *perencanaan*; adalah bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir (Dahuri, 2001:19).

Dahuri *et al.* (1996) dan Tomascik (1997) menjelaskan bahwa pesisir dan laut Indonesia terdiri dari rangkaian sistem ekologi yang terkait satu sama lain. Rangkaian tersebut terdiri dari *wilayah estuaria*, *wilayah mangrove*, *wilayah padang lamun* dan *wilayah terumbu karang*.

1. Kawasan Estuaria

Kawasan estuaria merupakan pertemuan antara perairan air tawar dan air laut (Wibowo *et al.*, 1996:27). Kawasan ini terbentuk di ujung sungai besar yang bermuara ke laut yang berpantai landai. Bercampurnya air tawar dan air laut menjadikan wilayah ini unik dengan terbentuknya air payau dengan salinitas yang berfluktuasi. Perbedaan Salinitas mengakibatkan terjadinya lidah air tawar dan pergerakan massa air di muara. Aliran air tawar dan air laut yang terus menerus membawa mineral, bahan organik, serta sedimen dari hulu sungai ke laut dan sebaliknya dari laut ke muara. Unsur hara ini mempengaruhi produktivitas wilayah perairan muara. Karena itu produktivitas muara lebih tinggi dari produktivitas ekosistem laut lepas dan perairan tawar.

Jumlah spesies flora dan fauna yang berada di perairan muara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan spesies di perairan tawar atau laut, tetapi kerapatan (jumlah individu) setiap spesies relatif lebih besar (Wibowo *et al.*, 1996:28). Wilayah estuaria merupakan habitat yang penting bagi sejumlah besar ikan dan udang untuk memijah dan membesarkan anak-anaknya. Beberapa larva ikan yang dipijahkan di laut lepas juga bermigrasi ke wilayah estuari pada fase larvanya.

Sifat *ecotone* (wilayah peralihan ekosistem) dan karakter lokasinya serta morfologinya landai, estuaria sangat rentan terhadap kerusakan dan perubahan alami atau buatan. Pembuangan limbah, penggunaan perairan sebagai sarana pengangkutan, serta berubahnya sistem DAS, merupakan bagian penyebab degradasi kualitas ekosistem estuaria.

2. Kawasan Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove terdiri dari hutan atau vegetasi mangrove yang merupakan komunitas pantai tropis. Secara umum, karakteristik habitat hutan mangrove tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, herlempung, dan/atau berpasir (Wibowo *et al.*, 1996:13, Bengen, 1999:24). Daerah habitat mangrove tergenang air laut secara berkala, setiap hari, atau pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove. Hutan mangrove menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat serta terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Habitat hutan mangrove memiliki air bersalinitas payau (2-22 bagian per mil) hingga asin (mencapai 38 bagian permil). Hutan mangrove banyak ditemukan di pantai teluk yang dangkal, estuaria, dan daerah pantai yang terlindung.

Indonesia memiliki vegetasi hutan mangrove dengan keragaman jenis tinggi. Jumlah mencapai 202 jenis terdiri 89 jenis pohon, 5 palem, 19 liana, 44 epifit dan 1 jenis sikas (Bengen, 1999:75). Terdapat sekitar 47 jenis vegetasi yang spesifik hutan mangrove. Dalam hutan mangrove, paling tidak terdapat salah satu jenis tumbuhan mangrove sejati, yang termasuk dalam empat famili: *Rhizophoraceae* (*Rhizophora*, *Bruguiera*, dan *Ceriops*), *Sonneratiaceae* (*Sonneratia*), *Avicenniaceae* (*Avicennia*), dan *Meliaceae* (*Xylocarpus*).

Pohon mangrove sanggup beradaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah, salinitas yang tinggi, dan terhadap tanah yang kurang stabil serta pasang surut. Tumbuhan mangrove merupakan sumber makanan potensial bagi semua biota yang hidup di ekosistem mangrove (Bengen 2000:44, Nirarita *et.al.* 1996:124). Komponen dasar rantai makanan di ekosistem mangrove adalah serasah yang berasal dari daun ranting, buah, dan batang mangrove. Serasah ini sebagian besar didekomposisi oleh bakteri dan fungi menjadi nutrisi terlarut yang dapat dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton, algae, maupun mangrove itu sendiri dalam proses fotosintesa. Sebagian serasah tadi dimanfaatkan oleh udang, ikan, dsb. sebagai makanan (dalam bentuk partikel; detritus).

Karakter pohon mangrove yang khas, ekosistem mangrove berfungsi sebagai peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi, penahan Lumpur, dan perangkap sedimen. Ekosistem mangrove merupakan pengha-

sil detritus dan merupakan daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), daerah pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya dan sebagai pemasok larva ikan, udang serta sebagai tempat pariwisata.

3. Kawasan Ekosistem Padang Lamun (*Sea grass bed*)

Padang lamun adalah ekosistem yang ditumbuhi lamun sebagai vegetasi yang dominan (Tomascik *et al.*, 1997:99, Wibowo *et al.*, 1996:48). Wilayah ini terdapat antara batas terendah daerah pasang surut sampai kedalaman tertentu di mana matahari masih dapat mencapai dasar laut. Padang lamun mendukung kehidupan biota yang cukup beragam dan berhubungan satu sama lain. Jaringan makanan yang terbentuk antara padang lamun dan biota lain sangat kompleks. Selain itu, padang lamun adalah "pengekspor" bahan organik ke ekosistem lain seperti ekosistem terumbu karang dan hutan bakau melalui hewan herbivora atau melalui proses dekomposisi sebagai serasah.

Di Indonesia, padang lamun sering di jumpai berdekatan dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang (Tomascik *et al.*, 1997:100., Wibowo *et al.*, 1996:48) sehingga interaksi ketiga ekosistem ini sangat erat. Struktur komunitas dan sifat fisik ketiga ekosistem ini saling mendukung, bila salah satu ekosistem terganggu, ekosistem yang lain akan terpengaruh. Seperti terumbu karang, padang lamun memperlambat gerakan arus dan gelombang. Sedimen yang tersuspensi dalam air akan mengendap dengan lebih cepat. Sejumlah organisme yang tumbuh pada daun-daun lamun juga membantu proses sedimentasi ini, yang selanjutnya dapat menjaga kualitas ekosistem di sekitarnya yang rentan terhadap sedimentasi.

Ancaman terbesar dihadapi ekosistem padang lamun adalah pembuangan limbah dan air panas industri dan domestik. Eutrofikasi dan sedimentasi menjadi ancaman besar bagi padang lamun yang dapat menyebabkan layunya padang lamun akibat cendawan lumpur (*Myxomycetes*) (Giesen dalam Wibowo, 1996:87). Gangguan fisik seperti reklamasi, pembangunan tambak memberikan pengaruh negatif bagi eksistensi ekosistem padang lamun.

4. Wilayah Ekosistem Terumbu Karang

Wilayah ekosistem terumbu karang mencakup dataran terumbu (*reef bed*), lereng terumbu (*fringing reef*), goba (laguna yang terdapat di daerah terumbu karang), serta gosong karang (Tomascik *et al.*, 1997:102). Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang agak dangkal. Untuk mencapai pertumbuhan maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu yang hangat, gerakan gelom-

bang yang besar, serta sirkulasi yang lancar dan terhindar dari proses sedimentasi.

Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang paling produktif dan paling tinggi keanekaragaman hayatinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama Ekspedisi Snellius II (1984), di perairan Indonesia terdapat sekitar 350 spesies karang keras yang termasuk ke dalam 75 genera. Kerangka hewan karang berfungsi sebagai tempat berlindung atau tempat menempelnya biota laut lainnya. Sejumlah ikan pelagis bergantung pada keberadaan terumbu karang pada masa larvanya. Terumbu karang juga merupakan habitat bagi banyak spesies laut. Selain itu, terumbu karang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi. Dari sisi sosial ekonomi, terumbu karang adalah sumber perikanan yang produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan, penduduk pesisir dan devisa negara yang berasal dari perikanan dan pariwisata.

Pembuatan jetty, pembukaan lahan yang menyebabkan peningkatan sedimentasi, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun, pariwisata, dan transportasi laut yang serampangan merupakan ancaman terbesar bagi kondisi terumbu karang Indonesia. Ancaman ini telah menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan sehingga kondisi terumbu karang yang masih baik hanya tinggal 7% saja.

Potensi

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri: Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km², Laut Teritorial seluas 0,3 juta km², Perairan Nasional seluas 3,1 juta km², Luas Daratan sekitar 1,9 juta km², Luas Wilayah Nasional 5 juta km², luas EEZ (*Exclusive Economic Zone*) sekitar 3 juta km², panjang garis pantai 81.000 km dan jumlah pulau sekitar 17.000 pulau (Rais, 2001:21).

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah (a) *Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti*; Perikanan (*Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen*), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil. (b) *Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti*; minyak bumi dan gas, bahan tambang dan mineral lainnya serta harta karun. (c) *Energi Kelautan seperti*; pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*) (d) *Jasa-jasa Lingkungan seperti*; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung (*Penetralisir*) limbah (DKP dalam Dahuri, 2001:77)

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal,

Pelagis Kecil dan lainnya) sekitar 4,948,824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 15.105.011.400, Mariculture (rumput laut, ikan, kerang dan mutiara) sebanyak 528,403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039.100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US\$ 40.000.000.000, Secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US\$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US\$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. (DKP, dalam Rohmin Dahuri, 2001:88).

Penduduk Indonesia berkisar 60 % bermukim di wilayah pesisir. Berarti pesisir dapat dipandang pusat kegiatan perekonomian seperti perdagangan, perikanan laut, budidaya perikanan, transportasi laut, dan pariwisata berkonsentrasi di wilayah pesisir. Potensi wilayah pesisir dari segi ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sangat lambat dan sebagian besar penduduknya masih termasuk kategori miskin. Potensi wilayah pesisir dipandang dari segi kelembagaan adalah masih sangat terbatas.

Pengelolaan Wilayah Pesisir

Manusia sebagai bagian dari ekosistem, dalam kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan ekosistem lain di wilayah pesisir dan secara sengaja maupun tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan ekosistem. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah dengan cara bagaimana dan dengan kegiatan apa saja manusia dapat merubah sistem ekologi di wilayah pesisir? Jawabnya sudah tentu merujuk pada akibat kegiatan manusia, antara lain pembukaan lahan untuk pertanian, pembakaran hutan/pohon, pembangunan waduk, penggundulan hutan, pembangunan gedung, pembuangan limbah, perkerasan jalan. Kegiatan manusia yang mengganggu/merusak ekosistem tadi kalau dilihat sepintas nampaknya hanya berpengaruh pada ekosistem yang diganggu, kalau dilihat lebih lanjut kegiatan di satu ekosistem dapat berpengaruh pada ekosistem lain yang terkait (Kaswadji, 2001:34).

Dahuri (2000:126), menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada ekosistem pesisir (mangrove, misalnya), cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain) di lahan atas suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dilakukan secara bijaksana

(berwawasan lingkungan), maka dampak negatifnya akan berpengaruh pada tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir.

Lebih jauh Kaswadji (2001:37), menjelaskan keterkaitan antara tiga ekosistem utama pesisir. Ekosistem mangrove merupakan penghasil detritus, sumber nutrisi dan bahan organik yang akan dibawa ke ekosistem padang lamun oleh arus laut. Ekosistem lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan nutrisi yang akan dibawa ke ekosistem terumbu karang. Selain itu, ekosistem lamun juga berfungsi sebagai penjebak sedimen (*sedimen trap*) sehingga sedimen tersebut tidak mengganggu kehidupan terumbu-karang. Yang terakhir, ekosistem terumbu karang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak (gelombang) dan arus laut. Selain itu ekosistem terumbu karang juga berperan sebagai habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi organisme yang hidup di padang lamun ataupun hutan mangrove.

Mengingat betapa penting nilai wilayah pesisir baik secara ekologis maupun ekonomis dengan semua komunitas yang hidup di dalamnya, banyak negara termasuk Indonesia telah mengembangkan suatu model pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Kay (1999:34), pengelolaan yang dilakukan meliputi pengelolaan strategis hingga pengelolaan operasional yang merupakan suatu tahapan pengelolaan yang terintegrasi. Suatu rencana baik, tidak terlalu banyak zonasinya, dapat dilaksanakan, dan mudah dimengerti. Clark (1996:54), membuat suatu diagram tahap-tahap pengelolaan wilayah pesisir yang merupakan siklus. Begitu juga Cincin-Sain (1998:67), dalam teori *Integrated Coastal Management (ICM)* yang dikembangkannya, memperlihatkan enam tahap dalam proses ICM : Tahap penilaian dan identifikasi isu, tahap persiapan dan perencanaan program, tahap pembiayaan dan adopsi, tahap pelaksanaan, tahap operasi, dan tahap evaluasi. Enam tahap ICM menurut Cincin-Sain tersebut sebagaimana Clark, merupakan suatu siklus.

Di Indonesia, departemen yang paling berwenang dalam mengkoordinasikan penataan ruang pesisir adalah Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP), salah satu direktoratnya yang membawahi bidang tersebut, yaitu Direktorat Pengelolaan Tata Ruang (DPTR) Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (P3K). Sebagai tindak lanjut tugas DPTR, pada tahun 2000 telah dilakukan temu pakar dalam rangka penyusunan konsep tata ruang pesisir. Dalam pertemuan tersebut masalah yang cukup mencuat adalah rencana tata ruang pesisir tidak bisa dilakukan dengan begitu saja dengan mengadopsi rencana tata ruang

daratan, tetapi dalam operasionalisasinya harus merujuk pada peraturan dan perundangan yang ada, antara lain Undang Undang Penataan Ruang.

Menurut Undang Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UUPR), perencanaan tata ruang merupakan satu tatapan dari keseluruhan proses penataan ruang. Dalam UUPR pasal 1, dinyatakan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Republik Indonesia, 1992). Penataan ruang dapat disederhanakan menjadi aktivitas mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Dengan demikian, kegiatan tata ruang tidak boleh berhenti dengan di-Perdakan rencana tata ruang, tetapi penataan ruang harus merupakan aktivitas yang terus menerus dilakukan untuk mengarahkan masyarakat suatu wilayah mencapai tujuan-tujuan pokok, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, rekreasi, termasuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, seperti menikmati keindahan alam dan tempat-tempat bersejarah (Darwanto, 2000:89).

Berbeda dengan penataan ruang daratan, paradigma yang dikembangkan di wilayah pesisir bersifat lebih kompleks karena selain tempat muara segala kegiatan dan bertemunya berbagai macam ekosistem, pesisir (laut) juga mempunyai vertikal zoning yang tidak dimiliki oleh daratan (Suwandono, 2000:54). Oleh karena itu dalam penyusunan tata ruang pesisir perlu diupayakan cara-cara atau metode-metode yang tidak hanya sekedar mengadopsi tata ruang daratan, tetapi perlu dikembangkan suatu model tata ruang pesisir yang bisa mengakomodasi kepentingan *stakeholder* yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan sumber daya dan ekosistem pesisir.

Temu pakar dalam rangka penyusunan konsep tata ruang pesisir antara lain merekomendasikan perlunya suatu pedoman dari pemerintah (dalam hal ini DELP) yang dipadukan dengan kepentingan masyarakat bawah, sehingga dapat terwujud suatu perencanaan tata ruang dan pengelolaan pembangunan yang lebih implementatif. Secara lebih rinci kesimpulan hasil temu pakar tersebut adalah (DELP, 2000:43):

Rencana tata ruang merupakan *public instrument* yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat berdasarkan aspirasi yang ada, sehingga dapat sejahtera, adil dan berkelanjutan. Dalam penataan ruang pesisir, perlu diperhatikan beberapa hal: (1) Prosesnya dilakukan secara *participatory approach* terutama untuk pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kegiatan. (2) Menggunakan pendekatan integrasi antara darat dan laut dengan memperhatikan DAS. (3) Memperhatikan unsur budaya masyarakat setempat. (4) Data informasi tentang pesisir dan laut

harus akurat. (5) Mempertimbangkan kebijakan yang rasional dan aspiratif. (6) Rencana harus sinergis antar sektor, tidak parsial dan konsisten. (7) Pengembangan *basic science*.

Beberapa Strategi Pembangunan Wilayah Pesisir dan Kelautan telah ditetapkan melalui departemen terkait adalah: (1) Peningkatan produksi perikanan. (2) Rehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut. (3) Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus penemuan produk serta jasa kelautan. (4) Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan. (5) Penerapan iptek dan manajemen profesional. (6) Dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif. (7) Keberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir. (8) Sistem, mekanisme hukum dan kelembagaan yang mampu memfasilitasi segenap kiprah pembangunan kelautan (DELP, 2001:57).

Isu Pengelolaan Pesisir

1. Perubahan Keseimbangan

Perubahan keseimbangan yang menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir sebagian besar disebabkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh manusia, utamanya oleh pertumbuhan populasi di wilayah pesisir (Delaware, 1999). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan sumber daya pesisir meningkat. Beberapa contoh adalah pembangunan infrastruktur, transportasi, serta konsumsi hasil sumber daya pesisir, baik secara ruang maupun secara material. Selain kebutuhan konsumsi, limbah produk dan kegiatan juga menimbulkan perubahan keseimbangan di wilayah pesisir. Pencemaran perairan pesisir dapat menurunkan secara drastis produksi perikanan (Chua dalam Delaware, 1999:121).

Perubahan keseimbangan ini akan menimbulkan perubahan alokasi sumber daya bagi seluruh *stakeholders* yang ada di wilayah pesisir. Perubahan ini akan mempengaruhi kondisi masalah, tujuan pengelolaan, kapasitas produksi, konstituensi, serta institusi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

2. Masalah yang ditimbulkan

Kegiatan pembangunan wilayah pesisir dapat mempengaruhi ekologi wilayah pesisir serta fungsi dan proses dari pesisir dan laut serta sumberdayanya. Pembangunan industri di wilayah pesisir dapat menurunkan produktivitas lahan basah dengan menambahkan pencemar seperti logam berat, serta mengubah pola sirkulasi air dan suhu. Kegiatan akuakultur seringkali mengalih-fungsikan mangrove menjadi tambak, menyebabkan terganggunya fungsi dan proses yang ada di sistem mangrove, seperti fungsi daerah penyangga bagi badai pesisir dan abrasi, serta sebagai *nursery* bagi banyak kehidupan yang laut yang ekonomis.

Konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan berkaitan dengan sumber dayanya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Konflik di antara pengguna yang mengenai pemanfaatan daerah pesisir dan laut tertentu. (2) Konflik di antara lembaga pemerintah yang melaksanakan program yang berkaitan dengan pesisir dan laut. Menurut Miles 1991 (*dalam Delaware, 1999:78*), konflik antar pengguna melingkup: (1) Kompetisi terhadap ruang dan sumberdaya pesisir dan laut. (2) Dampak negatif dari suatu kegiatan pemanfaatan terhadap kegiatan yang lain. (3) Dampak negatif terhadap ekosistem. Sementara konflik antar lembaga menurut Miles 1991 (*dalam Delaware, 1999:79*) sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan mandat hukum dan misi yang berbeda, perbedaan kapasitas, perbedaan pendukung atau konstituensi, serta kurangnya komunikasi dan informasi (Cicin-Sain, 1992:121).

Peningkatan Pencemaran dan Penurunan Sumberdaya

Kegiatan manusia di wilayah pesisir telah menimbulkan perubahan yang mengarah pada peningkatan pencemaran. Melalui badan air bahan pencemar mencapai wilayah pesisir dan berakibat pada turunnya produktivitas habitat. Selain itu, pencemaran pesisir juga membahayakan kesehatan penduduk di wilayah pesisir. Sebagai gambaran, pencemaran mercury di Teluk Jakarta telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (Dutton, 2000:75). Pencemaran pesisir juga mengancam industri yang berbasis air seperti akuakultur, perikanan dan pariwisata.

Pemanfaatan sumber daya pesisir yang berorientasi pada produksi tanpa memperhatikan proses dan siklus perubahan dalam sumber daya wilayah pesisir dan laut menyebabkan siklus pemulihan yang dimiliki oleh sumber daya pesisir terganggu. Orientasi pada output produksi juga telah menyebabkan rusaknya habitat dalam ekosistem pesisir. Hal ini kemudian menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya wilayah pesisir. *Overfishing* telah menurunkan hasil tangkap dan dengan demikian menurunkan penghasilan dari perikanan. Sekitar 80% terumbu karang di Wilayah Timur Indonesia telah rusak karena perikanan dengan cara yang merusak. Sebuah penelitian oleh Pet-Soede *et al.* (1999:34), menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat pemboman ikan setelah 20 tahun dapat mencapai US\$ 306,800 per kilometer persegi. Angka ini mencerminkan biaya bagi masyarakat, dimana biaya ini adalah empat kali lebih besar dari manfaat total (*total benefit*) kegiatan ini.

Penutup

Dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya melalui potensi wilayah pesisir dan kelautan, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan semua komponen yang ada di wilayah pesisir. Potensi yang sangat besar dan prospektif yang dimiliki oleh pesisir tersebut, harus menjadi kewajiban bagi *decision makers* di setiap wilayah, untuk melestarikannya mengeksplorasinya secara berimbang dan proporsional demi kepentingan kemaslahatan rakyat banyak. Selain sebagai penyangga atau benteng di front terdepan dalam menghadapi ancaman dari laut, juga sebagai sumber pendapatan yang sangat profitable dalam menyangga kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Penduduk Indonesia yang hampir enam puluh persen berdiam di pesisir itu, pada gilirannya akan semakin terangkat harkat dan derajat ekonominya, dengan adanya perencanaan yang terpadu dan sistematis tersebut.

Daftar Pustaka

- Bengen, D. G. 1999. *Pedoman Teknis Pengenalan & Pengelolaan Ekosistem Mangrove*, PK-SPL IPB dan Proyek Pesisir.
- Bengen, D.G. 2000. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir*. Bogor: PK-SPL. IPB
- Cicin-Sain, B. and R.W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management*. Washington, USA: Island Press.
- Clark, J.R. 1996. *Coastal Zone Management Handbook*. Boca Raton Florida, USA: Lewis Publishers.
- Dahuri, M., J. Rais, et al., 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dahuri, R. 2000. *Orientasi Baru: Menoleh ke Laut*. Dalam: *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: LIPSI Ditjen Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- , 2001. *Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kawasan Pesisir Indonesia*. Bogor: PK- SPL. IPB.
- Darwanto, H. 2000. *Mekanisme Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Serta Hubungan Dengan RTRWN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota*. Jakarta: Ditjen Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- Delaware. 1999. University of Delaware, NOAA's National Ocean Service, Intergovernmental Oceanographic Commission, The World Bank.

- DELP (Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan). 2000. *Rangkuman Hasil Diskusi Floor*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- , 2001. *Fungsi dan Program Kerja Dirjen Urusan Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil*. <http://www.delp.go.id/ie/tentang/p3k.htm>
- Dutton, I. M. 2000. In *Seminar on the Future of Jakarta Bay* Jakarta: Bapedalda and DKI Jakarta.
- Fauzi, A. 2001. *Kelimpahan Sumberdaya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi*. Bogor: PK-SPL. IPB.
- Kaswadji, R. 2001. *Keterkaitan Ekosistem Di Dalam Wilayah Pesisir*. Bogor: Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB.
- Kay, R. and J. Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. London, UK and New York, USA: E & FN Spon.
- Pet-Soede, C., Cesar, H. S. J. and Pet, J. S. 1999. *An Economic Analysis of Blast Fishing on Indonesian Coral Reefs Environmental Conservation*.
- Rais, J. 2001. *pedoman Penggambaran, Pengukuran dan Penetapan Jakarta: Batas Kewenangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Laut*. DKP.
- Republik Indonesia. 1992. *UU 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*. <http://www.signas.or.id/Produkhukum/rutr2.html>.
- Suwandono, D. 2000. *Pendekatan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pantai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- Tomascik, T., Mah, A. J., Nontji, A. and Moosa, M. K. (1997). *The Ecology of the Indonesian Seas-Part One*. Singapore: Periplus Editions Ltd.
- Wibowo, P., Nirarita, C. E., Susanti, S., Padmawinata, D., Kusmarini, Syarif, M., Hendriani, Y., Kusniangsih and Simulingga, L.B. 1996. *Ekosistem Lahan Basah Indonesia: Buku Panduan untuk Guru dan Praktisi Pendidikan*. Bogor: Wetlands International Indonesia Programme.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH DI MADANI

1. Naskah harus bersifat ilmiah orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan tidak akan dipublikasikan pada media lain, baik dalam bentuk artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian. Panjang naskah maksimal 25 halaman termasuk daftar pustaka. Diketik dengan jarak 2 (dua) spasi di kertas kuarto (A4). Berkas (file) naskah dibuat dengan Microsoft Word, dicetak dengan huruf *Time New Roman*, font 12 dengan menyertakan disket tulisan. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Sistematika penulisan artikel konseptual: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik) dan disertai dengan afiliasi lembaga asal penulis; kata kunci, maksimum 5 (lima) kata, abstrak tidak melebihi dari 100 kata; pendahuluan yang berisi latar belakang, dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke dalam subjudul-subjudul); penutup; dan daftar pustaka (memuat pustaka yang dirujuk saja).
3. Sistematika penulisan artikel hasil penelitian : judul; nama penulis (tanpa gelar akademik) dan disertai dengan afiliasi lembaga asal penulis; kata kunci, maksimum 5 (lima) kata; abstrak tidak melebihi dari 100 kata yang berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian; pendahuluan yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil pembahasan; penutup; dan daftar pustaka (memuat) pustaka yang dirujuk saja).
4. Daftar pustaka ditulis dan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh berikut ini dan diurut secara alfabetis dan kronologis, seperti contoh berikut ini:
Duke L, Dabiel. 1999. *School Policy*. Virginia: University of Virgia.
Fattah, Nanang. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: CV. Andira
Fiske, Edward B, 1998. *Desentralisasi Pengajaran: Politik dan Konsensus*.
Alih bahasa Basilius Bengoteku. Jakarta: Grasindo.
Huda, Nuril 1994. "Proses Pendidikan Guru: Penguasaan Bahan Ajar, Pengembangan Pribadi, dan Penguasaan Metodologi". *Mimbar Pendidikan*. XIII. Bandung: University Press IKIP Bandung.
5. Penyunting dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah tanpa merubah isinya, dengan atau tanpa memberitahukan penulis, dan menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi syarat.
6. Penulis terbuka bagi peminat dan pemerhati masalah sosial. Naskah telah diterima pengelola Jurnal paling lambat satu bulan sebelum jadwal penerbitan.
7. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per judul, dan penulis menerima nomor bukti 2 (dua) dan cetak lepas satu eksamplar, setelah kontribusi biaya cetak dibayar.